

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan
Agama Wates Nomor 335/Pdt.G/2020/PA.Wt)**

Ari Febriati-2110622027

Abstrak

Perkawinan dinyatakan sah jika sejalan dengan aturan agama dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana UU Perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran perkawinan sebagaimana diatur UU tersebut maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, terdapat pertentangan antara peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan peran dari advokat, dan muncul adanya ketidakpastian hukum terkait JPN dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap pemalsuan status pria yang sudah beristri. Penelitian ini hendak mengkaji bagaimana kewenangan JPN dalam pembatalan perkawinan terhadap pemalsuan status pria yang sudah beristri. Metode dalam riset ini adalah yuridis normatif. Hasil riset bahwa pembatalan perkawinan yang dimohonkan JPN atas dasar pemalsuan status pria yang sudah beristri adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum tetap serta berlaku sejak saat terjadinya perkawinan yang artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada/terjadi. Perlu adanya pembaharuan hukum dalam UU Perkawinan agar JPN mempunyai kedudukan hukum yang pasti dalam pembatalan perkawinan terkait poligami.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara.

**AUTHORITY OF STATE PROSECUTORS IN THE
ANNULMENT OF MARRIAGES (Case Study of The
Determination of The Wates Religious Court Number
335/Pdt.G/PA.Wt)**

Ari Febriati - 2110622027

Abstract

Marriage is declared valid if it is in line with religious rules and has fulfilled the legal conditions of a marriage as stipulated in the Marriage Law. If there is a violation of marriage as regulated by the law, a marriage annulment can be carried out. Based on the Determination of the Wates Religious Court No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt, there is a conflict between the role of the State Attorney (JPN) in submitting a marriage annulment application and the role of an advocate, and there is legal uncertainty regarding the JPN being able to cancel a marriage against a man who is already married. This study aims to examine how the authority of the JPN in the annulment of marriage against the falsification of the status of a man who is already married. The method in this research is normative juridical. The result of the research is that the annulment of marriage requested by JPN on the basis of falsifying the status of a man who is already married is legally valid and legally binding and applies from the time of the marriage, which means that the marriage is considered to have never existed / occurred. There is a need for legal reform in the Marriage Law so that JPN has a definite legal position in canceling marriages related to polygamy.

Keywords: Marriage Annulment, Authority, State Attorney.